

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita berbicara tentang kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri ada dan selalu menjadi pusat kehidupan manusia, sehingga tidak ada habisnya atau ujungnya. Kemiskinan berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan dan kondisi manusia itu sendiri, dan meningkat sesuai dengan kehidupan manusia. Juga, massa ke massa harus berubah dari waktu ke waktu dan wilayah.

Kemiskinan secara umum mengacu pada ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan layak. Dan negara dalam hal ini pemerintah telah dan berkewajiban untuk mewujudkan hak-hak rakyat tersebut, dan mewujudkannya dengan berbagai cara agar tingkat kesejahteraannya terus meningkat. .

Kami menyadari berbagai upaya dan upaya yang telah dan sedang dilakukan di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah, untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Alhasil, terlihat jelas bahwa angka kemiskinan turun berkali-kali lipat dan terus membaik. Namun pemerintah tetap tidak berpuas diri dan terus bergerak menuju hasil yang lebih tinggi dan memuaskan.

Menurut data BPS, selama lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 10,95% (72.972 jiwa) pada tahun 2018, 10,53% (72.880 jiwa) pada tahun 2019 dan 10,53% (72.880 jiwa) pada tahun

2020 sebesar 10,31% (57.879 jiwa). Sebaliknya pada tahun 2021 proporsinya meningkat menjadi 10,41% (59.379 jiwa) akibat pandemi Covid 19, namun pada tahun 2022 proporsinya menurun menjadi 9,95% (57.977 jiwa).

Tabel 1.1 Proporsi Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu

Penjelasan	Tingkat Kemiskinan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
Persentase (%)	10.95	10.53	10.31	10.41	9.95
Jumlah orang miskin (jiwa)	72.972	72.880	57.879	59.379	57.977

Sumber: BPS Rokan Hulu (2018-2022)

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kepentingan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dari pusat hingga pedesaan, dengan fokus yang lebih besar pada status kesehatan kemiskinan ekstrim, yaitu mereka yang berada di bawah atau di atas garis kemiskinan. sisi ekstrim. Penghasilan setara dengan 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP adalah keseimbangan pengeluaran atau daya beli dan tidak mengecualikan orang yang termasuk dalam kategori miskin umum, dengan kata lain, jika seseorang membelanjakan kurang dari Rp 10.739/hari/ orang atau Rp, 322, 170/orang/bulan, ia termasuk dalam kategori termiskin (BPS, 2021). Jadi, misalnya, untuk keluarga beranggotakan empat orang (ayah, ibu, dan dua anak), untuk memenuhi pengeluaran sebesar Rp 1.288.680/ bulan (BPS, 2021).

Angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 terbukti sebesar 4% atau 10,86 juta. Kemiskinan ekstrem ini termasuk rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional (10,14 persen atau 27,54 juta jiwa per Maret 2021) berdasarkan data Susenas yang diterbitkan secara rutin

oleh BPS. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia akan menjadi 4%, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim Indonesia baru tercapai di 7 provinsi dan 35 desa, dan akan diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota pada tahun 2022. Total angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa, sedangkan data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan angka Provinsi Riau sebesar 1,40% atau 1,0033 juta jiwa. Untuk garis kemiskinan dari Bank Dunia, diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu, tingkat kemiskinan total adalah 1,90 persen, atau sebanyak 191.922 orang, dan jumlah rumah tangga yang sangat miskin adalah Desil 1 sebanyak 10.708 Rumah Tangga dengan 55.200 Jiwa dan Desil 2 sebanyak 10.665 Rumah Tangga dengan 48.492 Jiwa.

Tabel 1.2 Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022

Penjelasan	Persen	Jumlah
Nasional	2,04%	5,59 juta orang
Provinsi Riau	1,40%	100,33 ribu jiwa
Kabupaten Rokan Hulu	1,90%	191.922 jiwa

Sumber: Data BPS (diolah)

Implementasi ini akan dikukuhkan dengan arahan Presiden pada rapat yang ketat tentang Percepatan Rencana Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021 untuk mencapai kemiskinan ekstrim sebesar 0 (nol) persen atau enam (6) tahun lebih awal dari yang diamanatkan SDGs (Global Goals) pada tahun 2024, dengan ini Presiden RI mengeluarkan intruksi No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim yang dikeluarkan pada 8 Juni 2022.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing, dan melalui partisipasi masyarakat setempat, ketepatan tujuan dan kerjasama dengan kementerian/lembaga. Menjamin integrasi program antara pemerintah daerah. Dalam bidang dan sasaran pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrim tersebut di atas, kebijakan terlebih dahulu harus difokuskan pada pelaksanaan program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim secara tepat melalui proyek-proyek kebijakan, termasuk pengurangan beban penduduk berupa Bantuan Sosial, Jaminan dan Bantuan Sosial. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan bersama. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pembangunan layanan infrastruktur dasar.

Melihat tren jumlah penduduk Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir selama 5 tahun terakhir, 2018 (2170 jiwa), 2019 (2185 jiwa), 2020 (2206 jiwa), 2021 (2231 jiwa), dan 2022 (2258 jiwa), maka jumlahnya penduduk miskin di desa Rambah Hilir Tengah terkait dengan angka kemiskinan dalam tahun terakhir, 2018 (238), 2019 (230), 2020 (227), 2021 (232), dan 2022 (225).

Tabel: 1.3 Persen Penduduk Miskin di Desa Rambah Hilir Tengah

Penjelasan	Tingkat Kemiskinan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	2.170	2.185	2.206	2.231	2.258
Persentase (%)	10.95	10.53	10.31	10.41	9.95
Jumlah Orang Miskin (jiwa)	238	230	227	232	225

Sumber: Profil Desa Rambah Hilir Tengah (dalam prosesi)

Dari bidang pendidikan Desa Rambah Hilir Tengah terdapat 2 unit SD, 7 unit TK/PAUD, 2 unit SMP dan 1 unit SLB. Sedangkan untuk bidang kesehatan hanya ada bidan desa. Di satu sisi mereka dilihat dari keadaan ekonomi yaitu pertanian dan peternakan.

Selain itu, Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 adalah data keluarga dan individu keluarga dari pemutakhiran basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga/Pendataan Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional) dan pengumpulan informasi. PK-BKKBN 2021) akan dimutakhirkan untuk setiap wilayah (RT/Dusun/RW) dan semua tingkat kabupaten administrasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat), disimpan dalam file elektronik, dan disertakan NIK. Melalui DUKCAPIL yang memiliki status kesejahteraan (Desil).

Karena Desil merupakan golongan ke-10 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, data Kecamatan Rambah Hilir menunjukkan bahwa 23.156 (8,68%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 266.792 jiwa atau sebanyak 5.835 rumah tangga (9,02%) dari total Kabupaten Rokan Hulu 64.660 Rumah Tangga di berada di 6 desil, dan di Desa Rambah Hilir Tengah, data 1.554 jiwa (6,71%) dari total Kecamatan Rambah Hilir 23.156 jiwa atau 385 Rumah Tangga (6,60%) dari jumlah total Kecamatan Rambah Hilir memiliki 5.835 Rumah Tangga (RT) di 6 kesejahteraan (Desil) rumah tangga.

Tabel 1.4 Data P3KE Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

Penjelasan	Jiwa	%	Rumah Tangga	%
Kabupaten Rokan Hulu	266.792		64.660	
Kecamatan Rambah Hilir	23.156	8,68	5.835	9.02
Desa Rambah Hilir Tengah	1.554	6,71	385	6,60

Sumber: Data P3KE Rokan Hulu 2022 (diolah)

Status keberhasilan Desa Rambah Hilir Tengah berkisar dari peringkat kesejahteraan dari Desil 1 sampai dengan Desil 6 sebanyak 1.554 jiwa (385 RT) yang meliputi Desil 1 sebanyak 354 jiwa (67 RT), Desil 2 sebanyak 297 jiwa (70 RT), Desil 3 sebanyak 282 jiwa (67 RT), Desil 4 sebanyak 196 jiwa (53 RT), Desil 5 sebanyak 241 jiwa (68 RT) dan Desil 6 sebanyak 184 jiwa (60 RT). Di sisi lain, jika dilihat dari situasi ketenagakerjaan, terdapat 275 petani, 8 nelayan, 16 pedagang, 224 warga sipil, dan 968 pengangguran, 44 KK dan BPNT 43 KK. BST 42 keluarga dan sembako 40 keluarga.

Tabel : 1.5 Data P3KE Tahun 2022 Desa Rambah Hilir Tengah

Penjelasan	Jiwa	Rumah Tangga
Desil 1	354	67
Desil 2	297	70
Desil 3	282	68
Desil 4	196	53
Desil 5	241	68
Desil 6	184	60
Total	1.554	385

Sumber: Data P3KE Rokan Hulu 2022 (diolah)

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Rencana Strategisnya akan mengembangkan sumber daya yang diperlukan untuk menentukan apa yang dibutuhkan untuk implementasi

program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim secara tepat waktu. Isinya adalah sebagai berikut, ***Kesatu***, mengurangi beban pengeluaran melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi yaitu program/kegiatan kelompok. ***Kedua***, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan bersama. ***Ketiga***, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pembangunan layanan infrastruktur dasar.

Berdasarkan uraian mata di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian, ***'Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir'*** yang terdapat di desil 1 (satu) sampai 6 (enam).

1.2 Rumus Masalah

Dari latar belakang yang saya berikan, pertanyaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Kebijakan/Program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Rambah Hilir Desa Rambah Hilir Tengah ?
2. Bagaimana Pengaruh implementasi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa Rambah Hilir Tengah kecamatan Rambah Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mencermati kebijakan/program pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh implentasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Kelebihan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A). Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan kesadaran pembaca tentang pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.
- B). Selain itu peneliti akan memahami berbagai ilmu yang relevan didalamnya tentang pengaruh implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa Rambah Hilir Tengah kecamatan Rambah Hilir dapat memperluas pemikiran anda.

1.4.2 Manfaat Praktis

- A). Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- B). Untuk lebih mengembangkan konsep ini, mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang dinamis sambil mengakui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmunya dalam perkuliahan.

1.4.3 Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi diskusi dalam mempersiapkan skripsi ini, mahasiswa mengaturnya menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Ini meliputi ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan perkembangan landasan-landasan pendukung teologis terkait penelitian yang digunakan untuk menangani masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Ini termasuk ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, alat penelitian, dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengungkapkan bagaimana penulis menggunakan alat ini saat melakukan penelitian, meliputi gambaran umum topik penelitian, karakteristik responden, analisis penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian, termasuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Implementasi

Dalam bahasa Inggris, "to implement" berarti "mempraktekkan". Implementasi adalah menyediakan cara untuk melakukan suatu tindakan yang mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu.

Undang-undang, aturan administrasi, keputusan pengadilan, dan kebijakan lembaga pemerintah adalah contoh tindakan yang memiliki dampak atau efek pada kehidupan negara..

Cleaves disebutkan (dalam Wahab 2008; 187), yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari "proses memajukan menuju tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif dan politik". Implementasinya dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan sebenarnya untuk melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008: 68), implementasi adalah pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang fundamental, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk perintah eksekutif utama, keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat

atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Di sisi lain, hasil akhir dari program-program tersebut dapat diukur atau dibandingkan dengan tujuan kebijakan untuk mengevaluasi keseluruhan proses implementasi kebijakan.

Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3), politik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai atau mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Implementasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai aplikasi atau implementasi. Menurut Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003: 7) “implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling melengkapi”

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menjelaskan implementasi atau pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen dalam kerangka organisatoris-pengendalian. Jadi, ketika kebijakan telah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengatur, menjalankan pimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan. Secara rinci, kegiatan dalam mengelola implementasi kebijakan dapat diatur melalui:

1. Implementasi strategi
2. Mengatur
3. Mobilisasi dan kepemimpinan

4. Kontrol

Implementasi melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai "*birokrat tingkat jalanan*" untuk memberikan layanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, pelaksanaannya hanya melibatkan satu instansi yang bertindak sebagai pelaksana, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan penanggulangan kemiskinan di perdesaan, upaya implementasinya akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berkaitan. Dengan implementasi kebijakan, mengatur, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin implementasi dan melakukan kontrol rinci dari pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan dari implementasi strategi, organisasi, On-the-go kepemimpinan dan kontrol akan bekerja mulus sesuai keinginan.

Menurut Riant Nugroho (2004 : 163) Faktor – faktor implementasi kebijakan dilakukan dalam urutan manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut dikelola dalam tugas-tugas berikut:

1. Pertama adalah implementasi strategi, yaitu kebijakan dapat diimplementasikan secara langsung atau memerlukan kebijakan turunan

sebagai kebijakan implementasi. Konsep-konsepnya adalah sebagai berikut:

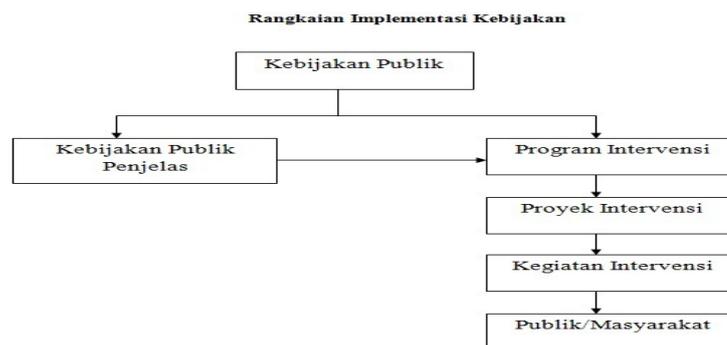
- (1)Sejajarkan struktur dengan strategi.
- (2)Melembagakan strategi.
- (3)Mengoperasionalkan strategi.
- (4)Gunakan prosedur untuk memfasilitasi implementasi.

2. Kedua, Organizing, yaitu merumuskan prosedur pelaksanaan yang diatur dalam model dasar pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan konsep sebagai berikut: (1) Desain organisasi dan struktur organisasi, (2) Pembagian kerja dan desain kerja, (3) Integrasi dan koordinasi, (4) Rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia,(5) Hak, wewenang dan kewajiban, (6) Delegasi, (7) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia dan (8) Budaya organisasi.

3. Faktor ketiga, yaitu mobilisasi dan kepemimpinan, adalah mengalokasikan sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, ketika kebijakan dalam fase ini secara bersamaan diberikan pedoman diskresioner atau ruang bagi pelaksana individu untuk memilih tindakan otonom mereka sendiri dalam batas wewenang ketika mereka bentrok. dengan situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Dengan konsep: (1)Efektivitas kepemimpinan,(2)Motivasi (3)Etika, (4)Kualitas, (5)Kerja tim, (6)Komunikasi organisasional, dan (7)Perundingan

4. Faktor keempat adalah kontrol, yaitu mengontrol pelaksanaan dengan melakukan proses pemantauan secara berkala dan konsep: (1)Mengontrol desain, (2)Sistem manajemen informasi, (3)Pengawasan, (4)Kontrol anggaran atau keuangan, dan (5)Audit.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua pilihan langkah yaitu implementasi langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rangkaian implementasi kebijakan

Implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah atau sektor swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya memperoleh hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri.

2.1.2 Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum. Jika undang-undang dapat menegakkan atau melarang perilaku (misalnya, undang-undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya memandu tindakan yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.

Tinjauan kebijakan atau kebijakan juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan penting organisasi, termasuk mengidentifikasi berbagai alternatif, seperti prioritas program atau pengeluaran, dan memilihnya berdasarkan dampaknya. Politik juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajerial, keuangan atau administratif untuk mencapai suatu tujuan yang eksplisit.

Secara umum kebijakan atau kebijakan adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang. Dalam hal ini, yang dimaksud bisa pejabat, lembaga atau bahkan kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pada dasarnya banyak penjelasan yang disertai dengan batasan atau pengertian kebijakan lainnya. Kebijakan adalah pedoman dan larangan yang berlaku umum.

Batasan yang menjadi arah dari suatu tindakan yang akan dilakukan. Serta aturan yang harus diikuti pelaku. Juga melaksanakan kebijakan,

karena sangat penting untuk diproses dalam suatu organisasi. Serta mengambil keputusan berdasarkan rencana yang telah dijabarkan dan disepakati bersama atas kesepakatan bersama. Oleh karena itu, politik menjadi sarana penyelesaian masalah akibat berbagai tindakan yang dilakukan.

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menguraikan dasar dari suatu masalah. Menjadi rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam pemecahan masalah sebagai pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan merupakan pedoman tindakan untuk mengambil suatu keputusan.

Ditinjau dari segi terminologi, pengertian kebijakan publik memiliki banyak arti. Itu semua tergantung dari sudut mana ia ditafsirkan. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu, menjalankan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan kebangsaan. bangunan.

Menurut Howlett dan M. Ramesh (Subarsono,2005:13) mereka berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu:

- a. Agenda setting, yaitu proses dimana suatu masalah dapat dibawa ke perhatian pemerintah.

- b. Perumusan kebijakan, yaitu proses penyiapan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yaitu proses dimana pemerintah memutuskan untuk mengambil suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yaitu proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan, yaitu proses pemantauan dan pemilihan pekerjaan atau hasil kebijakan.

Batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”.

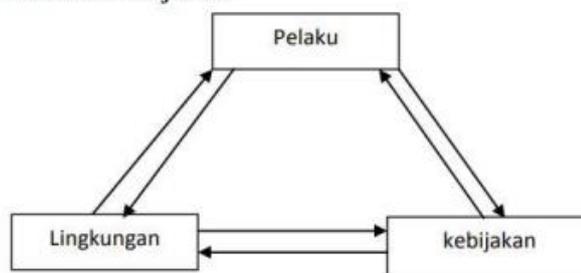
Pakar Jerman lainnya, Crimson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan bahwa politik adalah sebuah konsep, bukan fenomena yang spesifik atau konkrit, sehingga pendefinisianya akan menemui banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selain itu, Crimson juga membenarkan bahwa kebijakan tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dilihat sebagai pedoman tindakan atau rangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2017:166) politik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (peluang) dimana kebijakan itu

diusulkan. berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dijalankan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berkaitan dengan suatu masalah atau sesuatu yang menjadi perhatian. Politik juga dapat dilihat sebagai suatu sistem. Sistem adalah rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung serta tersusun dalam aturan-aturan tertentu sehingga menghasilkan satu kesatuan.

Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan meliputi hubungan timbal balik tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut digambarkan pada gambar berikut.

Tiga elemen sistem kebijakan



Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut
Dunn dalam Ayuningtyas (2014: 15)

Gambar 2.2 Komponen sistem kebijakan

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Semuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan politik. Ketiga komponen tersebut selanjutnya disebut sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang

berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang disesuaikan dengan aspek teknis, sosial politik, serta interaksi antar elemen kebijakan kebijakan.

William Dunn juga memaparkan penjelasan lebih detail mengenai sistem dan komponen kebijakan publik dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut.

a. Konten Kebijakan

Ini terdiri dari daftar pilihan keputusan urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi suatu kebijakan merespon berbagai persoalan publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

b. Pelaku atau pihak yang berkepentingan dalam politik

Pemangku kepentingan kebijakan atau pelaku kebijakan adalah individu atau kelompok yang terkait langsung dengan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor politik dapat terdiri dari sekelompok warga negara, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas jurnalistik, partai politik, lembaga pemerintah, dan sejenisnya.

c. Lingkungan kebijakan

Lingkungan kebijakan adalah lingkungan khusus di mana suatu kebijakan dihasilkan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

2.1.3 Kemiskinan

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan hidup yang dialami oleh seseorang yang memiliki pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum taraf hidup. Standar kebutuhan minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Batasan pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi tahun 1978, yaitu nilai pengeluaran makanan dalam rupiah yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per orang per hari. Sedangkan kebutuhan bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang tahan lama, dan barang dan jasa penting lainnya.

Definisi kemiskinan menurut Kuncoro (1997:102-103) adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum. Definisi ini mengandung tiga pernyataan dasar, yaitu: (1) Bagaimana mengukur taraf hidup; (2) Apa yang dimaksud dengan taraf hidup minimum; dan (3) Indikator sederhana apa yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu kompleks. Rumusan kemiskinan menurut Friedman (1992) adalah kekurangan kebutuhan dasar seperti yang dirumuskan pada konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi tersebut dirumuskan sebagai berikut: (1) Kebutuhan minimal sebuah keluarga untuk konsumsi pribadi (makanan, pakaian, perumahan, dll.); (2) Pelayanan esensial untuk

konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk masyarakat pada umumnya (air minum, sanitasi, listrik, transportasi umum, serta kesehatan dan pendidikan); (3) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka; (4) Pemenuhan tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka hak asasi manusia yang lebih luas; (4) Penciptaan lapangan kerja (tenaga kerja) sebagai sarana dan tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Lembaga Penelitian SMERU menetapkan definisi lain tentang kemiskinan, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan muncul dari ketimpangan kepemilikan alat-alat produksi, kemiskinan juga terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Mudrajad Kuncoro (2003: 123), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum antara lain dalam hal pengukuran kemiskinan berbasis konsumsi. Berdasarkan konsumsi tersebut, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan pokok lainnya; (2) jumlah kebutuhan lainnya sangat bervariasi, mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Walaupun United Nations Organization (PBB) menilai bahwa kemiskinan memiliki berbagai manifestasi, antara lain terbatasnya pendapatan dan kecukupan sumber daya produksi untuk menjamin penghidupan yang berkelanjutan, kelaparan dan kekurangan gizi, masalah

kesehatan, terbatasnya akses pendidikan dan pelayanan dasar, peningkatan jumlah penderita penyakit dan kematian akibat penyakit, gelandangan dan perumahan kumuh, lingkungan yang tidak sehat, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

Sach (2005:20) membedakan kemiskinan menjadi tiga kategori: kemiskinan ekstrim (absolut), kemiskinan sedang dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrim adalah keadaan rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rumah tangga dalam kemiskinan ekstrim mengalami kelaparan kronis, tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan, tidak memiliki air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak dapat menyekolahkan sebagian atau seluruh anak rumah tangga, dan mungkin kekurangan perumahan dasar. . Kemiskinan sedang mengacu pada kondisi bahwa rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi hanya untuk kebutuhan dasar. Untuk bagiannya, kemiskinan relatif diartikan sebagai pendapatan rumah tangga di bawah rata-rata proporsi pendapatan nasional. Rumah tangga yang termasuk dalam kemiskinan relatif di negara-negara berpenghasilan tinggi tidak memiliki akses ke barang-barang budaya, hiburan, rekreasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan dan manfaat lainnya untuk kelompok sosial tertinggi. Menganggap kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mengarah

pada konsep kemiskinan relatif. Di negara-negara maju, pemenuhan kebutuhan dasar bukan lagi masalah rumah tangga, penekanan partisipasi rumah tangga dalam dimensi sosial lebih ditekankan dan tidak menyimpang dari masyarakat “utama” lainnya.

Menurut Todaro (2008:203) kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya, yang terdiri dari: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah orang yang hidup di bawah tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Walaupun kemiskinan relatif merupakan kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatannya telah berhasil mencapai tingkat kebutuhan pokok minimum, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi masyarakat sekitarnya (Esmara,1986). Demikian pula yang dikemukakan oleh Webster (dalam Keban,1995) yang menjelaskan konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut dengan istilah “relative deprivation” merupakan pendekatan yang sangat sosial, dimana kemiskinan itu sendiri merupakan produk dari persepsi sosial, dari kebutuhan.

Lebih lanjut, Nasution (1996) berpendapat bahwa kemiskinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural disebut juga kemiskinan buatan (man-made poor). Baik secara langsung maupun tidak langsung, kemiskinan buatan disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang tidak hanya mencakup tatanan organisasi tetapi juga mencakup persoalan aturan yang telah ditetapkan.

Kemiskinan buatan membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia. Pada bagiannya, kemiskinan alam terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan alam, rendahnya penggunaan teknologi dan bencana alam. Dalam kondisi sumber daya manusia dan alam yang lemah/terbatas, peluang produksinya relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah. Selain itu, ada pula bentuk-bentuk kemiskinan yang juga menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Terdiri dari: (1) kemiskinan alam, (2) kemiskinan budaya dan (3) kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67 dan Baswir, 1997: 23).

Lain halnya dengan tulisan Suradi (2009;8) yang menjelaskan pandangan Griffin tentang pemaknaan kemiskinan di negara-negara Asia Selatan dan Tenggara, secara umum dilihat sebagai keadaan kelaparan, kekurangan gizi, selain sandang dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah. , tidak ada atau sangat sedikit kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan dasar, dll. Sejalan dengan tulisan Hermawati (2011;10) yang mengutip pemikiran Booth dan McCawley yang mengemukakan bahwa suatu keadaan dikatakan buruk jika ditandai dengan kekurangan atau ketidakmampuan untuk memenuhi tingkat kebutuhan manusia. Kemiskinan mencakup kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek utamanya adalah miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder adalah jaringan sosial yang

buruk, keuangan dan sumber informal, seperti gizi buruk, air, perumahan, perawatan kesehatan yang buruk dan pendidikan yang relatif rendah.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi sosial ekonomi warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan orang dapat dikatakan miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. sesuai untuk kemanusiaan. . Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air minum, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Prasetyo,2019).

Khusus untuk melihat karakteristik masyarakat miskin, tulisan Susantyo & Nainggolan (2018) menjelaskan pandangan Suharto dkk. (2004) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki beberapa dimensi, yaitu: (1) Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan); (2) Kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar hidup lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air minum dan transportasi); (3)

Tidak ada jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga; (4) Kerentanan terhadap guncangan individu dan masif; (5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbatas; (6) Tidak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; (7) Kurangnya akses pekerjaan dan penghidupan yang berkelanjutan; (8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental; dan (9) Cacat dan keterbelakangan sosial (anak terlantar, perempuan korban KDRT, Janda, Miskin, Kelompok Terpinggirkan dan Terpencil) Merujuk pula pada pasal (Suradi, 2009) yang menjelaskan 14 indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik melalui Direktorat Miskin (2007), yaitu:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai pada bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah.
3. Dinding rumah tinggal jenis bambu/kayu/tembok kelas rendah tanpa plester.
4. Tidak memiliki tempat buang air besar/bersama dengan rumah tangga lainnya.
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air/sungai/air hujan yang tidak dilindungi.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya makan daging/ayam/susu seminggu sekali.

9. Hanya membeli 1 (satu) set baju baru dalam setahun. Anda hanya boleh makan 1 (satu)/2 (dua) kali sehari.
11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan penghasilan kurang dari Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan maksimal kepala keluarga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Anda tidak memiliki tabungan/aset yang mudah dijual seharga Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, sapi, kapal motor atau barang modal lainnya.

Selain itu, terkait upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, mengacu pada Kementerian Sosial RI (2004:27), ada enam program utama penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, yaitu:

- 1) program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha campuran (KUBE),
- 2) program pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM)-KUBE untuk masyarakat miskin,
- 3) program rehabilitasi sosial bagi lingkungan marginal,
- 4) program asuransi jiwa dan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin,
- 5) program pengembangan aliansi sosial untuk pengentasan kemiskinan, dan

6) program terpadu untuk pengelolaan kota-kota miskin (poor development of adopsi of towns).

Sementara itu, merujuk pada tulisan Susantyo & Nainggolan (2018), salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui Conditional Cash Transfers (CCT) yang diadopsi oleh banyak negara dalam satu dekade terakhir (Fiszbein & Schady, 2009). Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan anda, tetapi penerimaan membutuhkan perilaku tertentu, seperti kehadiran di sekolah secara teratur/reguler atau pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar. Di Indonesia, program ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2007.

Penghitungan kemiskinan yang dilakukan Sajogyo (dalam Seldadyo et al, 2003) pada awal tahun 1970-an menggunakan tingkat konsumsi beras setara per kapita sebagai indikator kemiskinan. Tingkat konsumsi beras setara di pedesaan adalah 240 kg per orang per tahun, sedangkan di perkotaan adalah 360 kg beras per orang per tahun. Penduduk yang mengkonsumsi dibawah nilai ekuivalen tergolong miskin. Selain Sayogyo, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga melakukan perhitungan dengan pendekatan non moneter lainnya. BKKBN menggunakan 23 indikator untuk mengelompokkan keluarga menjadi 5

kategori, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga miskin menurut BKKBN adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari enam faktor penentu kemiskinan karena alasan ekonomi 6, yaitu: (1) Pada umumnya semua anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (2) anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk pulang, bekerja/sekolah, dan bepergian; (3) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah; (4) Minimal seminggu sekali keluarga makan daging/ikan/telur; (5) Dalam setahun terakhir semua anggota keluarga telah menerima paling sedikit satu stel pakaian baru; (6) Luas bangunan rumah sekurang-kurangnya delapan meter persegi untuk setiap penghuni.

2.1.4 Kemiskinan ekstrim

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan makanan, air minum, sanitasi yang layak, kesehatan, perumahan, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga pada akses pelayanan sosial (PBB,1996). Menurut Bank Dunia, orang yang berada dalam kemiskinan ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*), atau setara dengan Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana, jika dalam 1 keluarga ada 4 orang (ayah, ibu dan 2 anak), maka jika kemampuan

menutupi pengeluaran kurang dari Rp. 1.288.680 per keluarga/bulan, sehingga keluarga ini termasuk dalam kategori sangat miskin.

Pada bulan Maret 2021 garis kemiskinan ekstrim diperkirakan sebesar Rp. 11.941,12/orang/hari atau Rp. 358.233,6/orang/bulan (BPS,2021). Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu indikator Tujuan 1, yaitu: Kemiskinan Nol dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, yang disalurkan di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 cukup baik. Besar yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sangat miskin melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp. 526 triliun. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim adalah bagaimana memastikan bahwa program perlindungan dan pemberdayaan sosial dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden pada Rapat Strategi Terbatas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dapat mencapai 0%, maka

diperlukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang harus dilakukan secara terpadu melalui intervensi kolaboratif, serta upaya validasi data dan perbaikan database untuk mencapai ketepatan sasaran dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Indikator proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US\$1,90 pada PPP (paritas daya beli) tahun 2011. Garis kemiskinan nasional pada dasarnya adalah jumlah uang yang dibutuhkan seseorang. untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk kehidupan yang bermartabat. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi yang terdiri dari garis kemiskinan makanan yaitu harga 2100 kkal/kapita/hari ditambah garis kemiskinan bukan makanan yang dihitung dengan menggunakan metode partisipasi anggaran masyarakat. produk dasar di garis kemiskinan bukan makanan. keranjang terhadap kelompok produk dasar bukan makanan yang dikumpulkan modul konsumsi Susenas.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat miskin dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (1). penurunan beban pengeluaran publik; (2) meningkatkan pendapatan masyarakat; dan (3) meminimalkan daerah kantong kemiskinan.

(1). Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Pendapat Soemarso (2013:29) Pengeluaran adalah keluaran barang atau jasa yang dapat diukur, yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan keuntungan atau sebagai penurunan

aktiva bersih sebagai akibat penggunaan jasa ekonomi untuk menghasilkan pendapatan atau pajak oleh pemerintah. agensi. .

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai pengeluaran oleh rumah tangga yang membeli berbagai jenis kebutuhan pada tahun tertentu, dalam analisis ekonomi makro lebih sering disebut konsumsi rumah tangga. Berbagai jenis pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama adalah membeli berbagai barang atau jasa yang Anda butuhkan. Dalam perekonomian yang masih dalam tahap ekonomi rendah, sebagian besar pendapatan yang dikeluarkan digunakan untuk membeli makanan dan pakaian yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Pada tingkat pembangunan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan pakaian tidak lagi menjadi bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran lain seperti pendidikan, transportasi, perumahan, dan rekreasi sangat penting. Selain dibelanjakan, pendapatan yang diterima rumah tangga juga akan ditabung (Sukirno:2000).

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilaksanakan melalui program bansos dan jaminan sosial, yaitu: Bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Bantuan kesejahteraan khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Kesejahteraan Tunai, Bantuan Kesejahteraan Presiden, Bantuan Kesejahteraan Top Up Reguler, Tunjangan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi

kelompok berkebutuhan khusus seperti lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

(2). Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah pengembalian yang diterima oleh suatu organisasi/individu atas penyerahan barang dan/atau jasa kepada pihak lain. Pendapat senada juga diungkapkan oleh pernyataan Sohib (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan adalah proses bertambahnya harta sebagai akibat penyerahan barang dan/atau jasa selama periode yang bersangkutan. Harnanto (2019) juga mengungkapkan konsep pendapatan yang lain, menurutnya pendapatan adalah proses penambahan atau peningkatan aset dan penurunan atau penurunan kewajiban organisasi/individu yang disebabkan oleh kegiatan operasional organisasi/individu.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Intensif Kerja, pendampingan individu/kelompok dan penyediaan sarana dan prasarana. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pelatihan dan pelatihan profesional. Meningkatkan akses ke aset produktif, akses ke pinjaman modal dan akses ke penggunaan lahan. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses keuangan dan pasar, serta pendampingan dan

penguatan kewirausahaan. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

(3). Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Menurut Budhi (2013) yang mengutip pendapat Chambers bahwa “kemalangan” yang menyelimuti individu atau keluarga miskin adalah masalah isolasi. Isolasi fisik tercermin pada kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan isolasi sosial tercermin pada integrasi yang erat antara masyarakat miskin dengan masyarakat luas.

Pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan penduduk miskin dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Pendekatan wilayah merupakan pendekatan untuk memperkirakan penduduk miskin melalui kantong-kantong kemiskinan berupa desa miskin (desa tertinggal). Secara makro, pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat miskin dapat diidentifikasi melalui fasilitas (infrastruktur), kondisi jalan, akses transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat. orang di wilayah studi. Jika infrastruktur di daerah tersebut tergolong berkualitas rendah, maka taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut cenderung tergolong rendah. Desa yang infrastrukturnya kurang memadai diasosiasikan sebagai desa yang miskin.

Strategi ini merupakan sinergi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum yang memadai. Meningkatkan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur jalan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa kajian tentang implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut penulis lampirkan beberapa kajian terdahulu yang relevan.

Kotak 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Kualifikasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ricky Fernando Alexander Sumolang, (2018)	"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bitung"	Independen: Implementasi Kebijakan Ketergantungan: Pemberdayaan Intervensi: Pengentasan Kemiskinan	Dilihat dari komunikasi yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dengan dinas sosial cukup baik. Implementasi kebijakan mendapatkan hasil yang maksimal

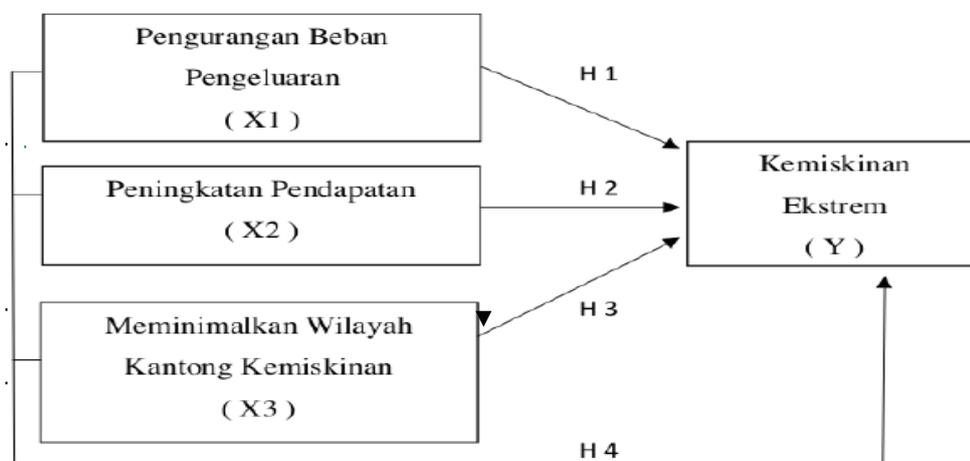
				sesuai tujuan dari program-program yang ada, salah satunya adalah PKH. Ketentuan dalam hal ini masih kurang dari aspek insentif, sehingga perlu ditambah.
2	Marliya (2019)	“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu”	Independen: Implementasi Kebijakan Ketergantungan: Pengurangan Kemiskinan	Dalam mendeskripsikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi, penelitian belum berjalan seperti yang diharapkan. Faktor penghambat program bantuan Raskin bagi

				masyarakat miskin di Kota Palu adalah aspek pemberian kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.
3	Rafiqur Rahman, (2020)	"Solusi Masalah Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu"	Mandiri: Kemiskinan Tanggung: Rokan Hulu	Disimpulkan bahwa secara umum solusi pengentasan kemiskinan di Rokan Hulu terdiri dari tiga poin mind map, yaitu: 1). Solusi Terkait Data, 2). Perbaikan cepat terkait program, dan 3). Solusi politik jangka panjang

4	Putri Suciana, (2022)	“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur)”	Independen: Implementasi Kebijakan Panitera: Kabupaten Bekasi Campur tangan: Kemiskinan	Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak terlepas dari empat kriteria, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi sebagai pendekatan pemerintah kabupaten Bekasi.
---	-----------------------	--	---	--

2.2 Kerangka konseptual

Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir, diperlukan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka pemikiran penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dan wawasan teoritis sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga Pengurangan Beban Pengeluaran berpengaruh dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- H2 : Diduga peningkatan pendapatan berpengaruh dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- H3 : Diduga Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan berpengaruh pada Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- H4 : Diduga Pengurangan Beban Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan dan Meiminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan berpengaruh dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Suharso (2018:26), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengejar tujuan, tema, objek, sampel data, sumber data, dan metodologi secara sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas. Penelitian ini bertempat di Rambah Hilir Tengah, sebuah desa di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Tahap penelitian berlangsung dari bulan Mei 2023 hingga Juni 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Seluruh gejala atau unit yang diselidiki disebut populasi. Konten, ruang lingkup, dan waktu harus dipenuhi untuk menetapkan batas populasi. Istilah populasi sasaran dan survei juga digunakan dalam demarkasi. Kerangka populasi yang direncanakan dalam desain penelitian adalah populasi sasaran. Namun, populasi penelitian adalah batas populasi yang ditemukan di lokasi, yang mungkin berbeda dengan populasi sasaran. Berdasarkan Data Sasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Desa Rambah Hilir Tengah yang

terdiri dari desil 1 sampai dengan desil 6 dari 385 rumah tangga (keluarga) miskin.

2. Sampel

Sampel berdasarkan jumlah dan karakteristik populasi penelitian (Sugiyono,2018). Dalam penelitian ini, kami menggunakan simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel probabilistik. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan hirarki populasi (Sugiyono, 2018). Gunakan rumus slovin untuk menentukan pengambilan sampel dengan rumus: Baseline yang ditemukan dalam pengambilan sampel adalah keluarga sangat miskin dari desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Sugiyono (2018), untuk menentukan besar sampel dan populasi penelitian ini digunakan “rumus Slovin” untuk menentukan besarnya sampel penelitian pada tingkat signifikansi yang dapat dipilih. Gunakan 0,05. (5%) atau 0,01 (1%)”.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel alias tingkat signifikansi adalah 0,05 (5%) atau 0,01 (1%)

Dalam penelitian ini, batas kesalahan maksimum (disebut juga tingkat signifikansi) yang diperbolehkan dalam sampel adalah 0,05 (5%). Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis, maka penelitian ini dilakukan di desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan peneliti diminta menyelesaikan penelitian dari Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 6 (enam). Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel: 3.1 Data dari Desil 1 sampai Desil 6

Penjelasan	Rumah Tangga (RT)	Jumlah sampel (RT)
Desil 1	67	57
Desil 2	70	60
Desil 3	68	58
Desil 4	53	47
Desil 5	68	58
Desil 6	60	52
Total	385	332

Sumber: Data P3KE 2022 Desa Rambah Hilir Tengah menggunakan Rumus Slovin (diolah).

Jadi peneliti menghitung menggunakan rumus Slovin menurut Sugiyono 2011 dan didapat 332 sampel.

3.3 Jenis dan sumber data

3.3.1 Jenis data

3.3.1.1 Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk numerik yang relevan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dan dikaitkan dengan teori yang ada.

3.3.1.2 Data Kualitatif, yaitu data yang mengorganisasikan data non numerik yang diperoleh dari kuesioner atau survey ke dalam format tabel atau persentase sehingga aspek-aspek yang terkandung dalam tabel tersebut dapat dibandingkan atau diinterpretasikan dan diperdebatkan.

3.3.2 Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data mentah atau belum diolah yang diperoleh dari suatu sumber. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner. Jadi saya langsung membagikan kuesioner dan mengajukan pernyataan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, penulis memperoleh sumber data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desa Rambah Hilir Tengah, panduan lain yang berkaitan dengan masalah penulisan penelitian, mengumpulkan data dari literatur berupa karya tulis, buku, internet, atau media lain, dan menggunakannya data yang dapat mendukung.

3.4 Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berikut ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan:

1. Observasi.

Notoatmodjo (2017:131) menegaskan bahwa metode observasi (pengamatan) merupakan hasil dari tindakan mental yang aktif dan penuh perhatian dalam memperhatikan rangsangan.

2. Metode kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti Bagaimana memberikan penjelasan kepada responden atas pertanyaan dan tanggapan tertulis (Sagiyono, 2018). Pengumpulan data melibatkan penyebaran survei atau kuis kepada responden untuk menemukan jawaban atau informasi yang mereka ketahui relevan dengan penelitian yang dilakukan. Survei yang digunakan responden melalui *Google Form* di alamat <https://bit.ly/KUESIONERHASBI23> dibagikan kepada responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari bahan-bahan seperti dokumen, peraturan, buku, majalah, prosiding konferensi, internet.

3.5 Definisi operasional

Variabel untuk penelitian ini dapat diidentifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2 Variabel Manipulasi X dan Y

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Pengurangan Beban Pengeluaran (X1)	Pengeluaran adalah produksi barang dan jasa yang diukur, dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan keuntungan, atau sebagai pengurangan kekayaan bersih yang dihasilkan dari penggunaan layanan ekonomi oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau pajak. (Soemarso, 2013:29)	Indikator pengurangan biaya: 1. Bantuan sosial reguler 2. bantuan sosial khusus 3. Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan 4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus Sumber : Kermenko PMK No. 32 Tahun Pedoman P3KE Tahun 2022

2	Peningkatan Pendapatan (X2)	Pendapatan adalah proses peningkatan atau peningkatan aset organisasi/individu dan penurunan atau pengurangan kewajibannya sebagai akibat dari aktivitas operasi organisasi/individu. (Harmanto, 2019)	Indikator peningkatan pendapatan: 1. Peningkatan akses pekerjaan. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan akses ke aset produktif, akses ke pembiayaan modal, dan akses ke penggunaan lahan 4. Pendampingan dan penguatan Kewirausahaan 5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan mikro. Sumber : Kermenko PMK No. 32 Tahun Pedoman P3KE Tahun 2022
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan (X3)	Kemiskinan adalah keterasingan fisik yang tercermin pada daerah-daerah kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan keterasingan sosial tercermin dalam eratnya integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat luas. (Budi, 2013)	Indikator untuk memperkecil daerah kantong kemiskinan: 1. Pemenuhan pelayanan dasar. 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah. Sumber : Permenko PMK No. 32 Tahun Pedoman P3KE Tahun 2022
4	Kemiskinan Ekstrim (Y)	Kemiskinan ekstrim adalah kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, yaitu akses terhadap makanan, air minum bersih, sanitasi yang memadai, kesehatan, perumahan, pendidikan dan	Indikator kemiskinan ekstrim: 1. PPP (Purchasing Power Parity) dengan pendapatan kurang dari USD 1,9 atau Rp 10.739/orang/hari atau Penduduk setara dengan Rp. 322.170/orang/bulan.

	informasi, yaitu akses terhadap pelayanan sosial yang tidak terbatas pada pendapatan. Menurut (United Nations, 1996) dan World Bank, extreme poor adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Bank Dunia, 2022)	2. Warga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sumber: Bank Dunia, 2022
--	---	---

3.6 Instrumen Penelitian

Dengan memanipulasi variabel-variabel tersebut, semua variabel diukur dengan menggunakan alat ukur ala kuesioner yang sesuai dengan skala Likert.

Menurut Sugiyono (2017:86), skala likert atau “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok tentang fenomena sosial”. Skor untuk setiap pernyataan pada kuesioner ditunjukkan pada tabel berikut. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3
Penilaian Skor Untuk Jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RG)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2017:87)

Suatu alat ukur dikatakan sebagai alat ukur yang baik jika memenuhi dua syarat yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan pengujian efektivitas dan reliabilitas instrumen yang ada.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:87), uji keefektifan perangkat merupakan indikator tingkat keefektifan perangkat. Tingkat signifikansi 5% atau 0,05 berarti suatu item dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis (r tabel). Pada penelitian ini, nilai- r dihitung menggunakan SPSS for Windows versi 24.

Saat membuat keputusan:

- a. Suatu unsur atau variabel dikatakan valid jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel.
- b. Jika r hitung tidak positif dan r hitung $<$ r tabel, maka elemen atau variabel tersebut tidak valid.
- c. Jika r hitung $>$ r tabel tetapi bertanda negatif, maka elemen atau variabel tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Tes ini dilakukan untuk mengukur tanggapan responden atau konsistensi tanggapan terhadap semua item pertanyaan. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan dengan faktor reliabilitas $>$ 0,06. (Duwi Priyatno, 2014). Pengujian reliabilitas penelitian ini didukung dengan program SPSS.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Analisis deskriptif

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah upaya melakukan pengukuran kuantitatif dari hasil pengumpulan data kuantitatif dan menganalisis data pengukuran tersebut. Teknik analisis data meliputi:

a. Verifikasi Data

Dengan kata lain, periksa kembali kuesioner yang diajukan oleh responden untuk memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab dengan lengkap.

b. Perhitungan nilai respon

Menghitung nilai frekuensi yang diberikan responden untuk setiap elemen pertanyaan.

c. Perhitungan nilai TCR

Menghitung nilai TCR dapat dilakukan sebagai berikut:

$$TCR = \frac{R_s}{N} \times 100\%$$

Dimana :

TCR = Tingkat Prestasi Responden

R_s = skor rata-rata jawaban responden

N = Skor respon maksimum

Tabel 3.4 Klasifikasi Tingkat Prestasi dan Bakat Responden

No	Tingkat Capaian Responden	Kriteria
1	90% - 100%	Sangat Baik
2	80% - 89,99%	Baik
3	65% - 79,99%	Cukup Baik
4	55% - 64,99%	Kurang Baik
5	0% - 54,99%	Tidak Baik

Sumber: *Sugiono (2015)*

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Duwi Priyatno (2014), uji asumsi klasik normalitas data merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh analisis parametrik. Untuk data yang berdistribusi normal, normalitas data penting karena data dianggap mewakili populasi. Ada beberapa kriteria syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi:

a. Uji Normalitas

Menurut Duwi Priyatno (2014), uji normalitas model regresi digunakan untuk menguji apakah residual dan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal. P-plot residu standar regresi, atau menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Duwi Priyatno (2014), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi telah menemukan korelasi antar variabel independen. Masalah multikolinearitas ada dalam model regresi ketika variabel independen berkorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen.

Dasar Keputusan:

Toleransi $> 0,10$ tidak menyebabkan multikolinearitas

Toleransi $< 0,10$ mengakibatkan multikolinearitas

Alternatifnya, ini bisa menjadi nilai VIF.

Nilai < 10 = tidak ada multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan memeriksa scatterplot antara nilai standar (ZPRED) dan residual yang dipelajari (SRESID). Menurut Duwi Priyatno (2014), heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat pola mirip titik yang membentuk pola tertentu yang teratur. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode lain yang dapat Anda gunakan adalah menggunakan metode glejser. Artinya, melakukan regresi variabel independen terhadap nilai absolut dari data residual. Disini untuk nilai sig > 0,05 tidak ada gejala heteroskedastisitas, tetapi untuk nilai sig < 0,05 berarti terdapat gejala heteroskedastisitas.

3. Metode Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) dan terikat (Y), dilakukan perhitungan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda seperti:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$$

Informasi :

Y = variabel dependen

X₁ X₂ dan X₃ = variabel independen

a = konstanta (X₁, X₂, X₃, nilai Y ketika X = 0)

b = koefisien regresi (kenaikan atau penurunan nilai)

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi variabel yang terlibat. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dalam variabel terikat.

Disarankan untuk menggunakan nilai R^2 yang disesuaikan saat Berbeda dengan R^2 · nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model (Dwi Prayitno, 2014).

Rumus koefisien determinasi adalah:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Informasi :

Kd = koefisien determinasi

r^2 = koefisien korelasi

5. Uji hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

Ghozali (2018:179) menyatakan bahwa uji parsial (uji-t) digunakan untuk menguji bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Subtes dengan tingkat signifikansi 0,05 digunakan dalam materi penelitian . Kriteria pengujian pada taraf signifikansi 5% adalah:

- a. Nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Nilai signifikansi $> 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Model (Uji F)

Untuk menjamin pengaruh bersama (kombinasi) variabel independen terhadap variabel dependen. Gunakan kriteria uji kunci, uji-F dasar untuk pengambilan keputusan.

- H_0 diterima jika: $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$
- H_a diterima jika. $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$.